

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024 (LPPD)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar berperan penting dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pengendalian kualitas penduduk untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang antara lain diupayakan melalui Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut terus dipertahankan sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan maka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Program KB dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Walaupun demikian, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tetap ada, seperti masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta belum meratanya LDP (Local Development Plan) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pendataan penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebanyak 143.096 jiwa dengan jumlah 37.242 Kepala Rumah Tangga. Oleh karena itu dalam program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 melalui RPJMD program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih menjadi program prioritas untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk dan pelembagaan keluarga kecil yang berkualitas.

Dengan berakhirnya pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dengan sasaran – sasaran kinerja dalam RKP bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Amin.

Benteng, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Gambaran Umum DP3AP2KB..... 3

1.3. Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....5

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara.....6

1.5. Inovasi16

1.6. Penghargaan16

**BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERITAHAN..... 17**

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan IKK
Keluaran/Output 17

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan IKK
Hasil/Outcome20

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan23

BAB. III PENUTUP24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan LPPD bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.2. Gambaran Umum DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A dan terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Email : bppkbkep.selayar@gmail.com , Tlp. (0414) 21195, dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan

pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



1.3. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

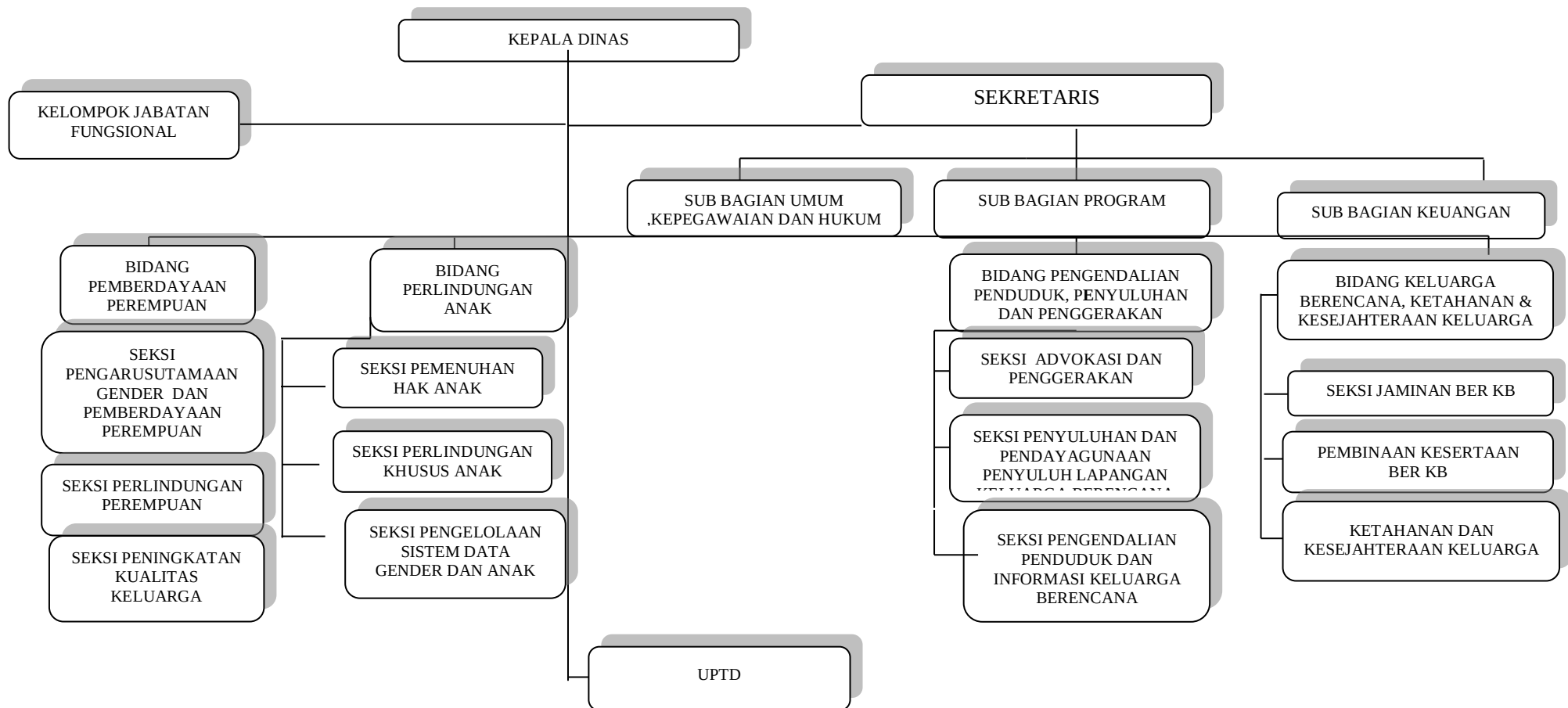
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural yang belum Terisi.

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Tabel. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	1 orang		
Eselon III/B	4 orang		
Eselon IV/A	6 orang		
Eselon IV/B	1 orang		
Fungsional		5 orang	
		17 Orang Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		8 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
Pelaksana	12 orang		
Jumlah	25	30	

2. Data Jabatan Struktural

Tabel. Jabatan Struktural

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Drs. ANDI MASSAILE Nip. 19650806 199402 1 003	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M. Nip. 19750426 200003 2 009	Sekertaris Dinas DP3AP2KB	
3	MARLINA ,SE Nip. 19670817 200003 2 006	Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
4	UTAMI REZKI, SH	Kabid. KB, Ketahanan	

	Nip. 19720118 2000604 2 016	& Kesejahteraan Keluarga	
5	ANDI IRMAYANI, SP Nip. 19851028 200803 2 002	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
6	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
7	Dra. SITTI NURSIHAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	
8	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
9	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
10	ILHAM, S.Pd.I Nip. 19661104 198603 1 006	Kepala UPT Wilayah III	
11	M. TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 1 050	Kepala UPT Wilayah II	
12	Hj. NURHADI MANDAI, S.Pd Nip. 19660504 198603 2 015	Kepala UPT Wilayah IV	
13	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kepala UPT Wilayah VII	
14	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	
15	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
16	BAHTIAR, A.Md Nip. 19730307 201502 1 001	Pengelola Kepegawaian UPTD PK & KB Wilayah V	

3. Data Jabatan Fungsional

Tabel. 1. Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
2	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
3	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
4	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
5	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
6	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
7	M. TABRIS. S Nip. 19660810 198803 1 015	Penyuluh Keluarga	Pegawai Pusat

		Berencana Kec. Bontomanai	
8	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
9	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
10	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
11	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
12	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
13	ASMARANI Nip. 19721219 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec,	Pegawai Pusat

		Bontomanai	
14	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
15	Hj. NURHAYATI Nip. 19660620 201212 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Taka Bonerate	Pegawai Pusat
16	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
17	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
18	NURDIN Nip. 19670211 200701 1 018	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasilambena	Pegawai Pusat
19	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
20	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana	Pegawai Pusat

		Kec. Bontosikuyu	
21	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat

Tabel. 2. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	RISNAWATI. DP, S.IP Nip. 19840511 201407 2003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
2	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
3	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
4	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Analisis Advokasi & Komunikasi, Informasi & Edukasi	
5	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Analisis Perlindungan Perempuan	
6	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
7	SABARIAH Nip. 19670102 200604 2 017	Pengadministrasi Keuangan	
8	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	
9	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	

Tabel. 2. P3K PENYULUH KB PUSAT

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	
2	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	
3	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	
4	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	
5	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	
6	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	
7	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	
8	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	

4. Jumlah Tenaga Kontrak / Pekerja Harian Lepas (PHL)

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	ISRAWATI IDRIS, SP	PHL	
2	ITA SAHARA, SE	PHL	
3	JUMRIATI, SE	PHL	
4	FAJRIANI, SE	PHL	
5	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd	PHL	
6	NELLY HAMDANA, S.Sos	PHL	
7	SITTI AISAH	PHL	
8	KASMIATI, S.A.P	PHL	

9	RIDAWATI, A.Md	PHL	
10	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	PHL	
11	NUR MAYA	PHL	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
12	FITRIANI	PHL	
13	RESTIA YULIANA, S.A.P	PHL	
14	SRI WAHYUNI. S	PHL	
15	HUJRANA. R,S.Pd	PHL	
16	BASNIA, S.A.P	PHL	
17	DESY SELFIANI, SKM	PHL	
18	RISKA ASTRIWANA KARIM	PHL	
19	DESI YULIANA PUTRI	PHL	
20	IRWAN SAPUTRA	PHL	
21	SATRIANI, S.Pd	PHL/ PENYULUH KB	
22	NUR INSANA, S.Kep. NS	PHL/ PENYULUH KB	
23	NUR RAHMAN HASFAR, S. Sos	PHL/ PENYULUH KB	
24	SULFIANI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
25	HASMIATI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
26	ANUGRAH PUTRA, S.Kom	PHL/ PENYULUH KB	
27	CITRAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
28	TALLASIANG	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
29	NOFALIA	PHL/ PENYULUH KB	
30	NIRMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
31	DARMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
32	ERMI SAHARA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
33	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
34	ISNAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
35	PEDI KRISTAL FIKRAM	PHL/ PENYULUH KB	
36	NURHAERANI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh

37	ROSNANI NINGSI	PHL/ PENYULUH KB	
38	NIRWANA	PHL/ PENYULUH KB	
39	NUR ABIDIN JAMAL	PHL/ PENYULUH KB	
40	NURMUFIDAH	PHL/ PENYULUH KB	
41	SITTI HUBAYA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
42	ROSMIDA	PHL/ PENYULUH KB	
43	ANDI ZULFIANA	PHL/ PENYULUH KB	
44	MUSDALIFAH	PHL/ PENYULUH KB	
45	BAU NARRU	PHL/ PENYULUH KB	
46	NASRULLAH	PHL/ PENYULUH KB	

5. Jabatan yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan	Jumlah	KET.
1	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum		
1	Operator Layanan Operasional	1	
2	Sub. Bagian Program		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengolah Data dan Informasi	1	
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	
3	Kepala Sub Bagian Keuangan		
1	Operator Layanan Operasional	1	
	Bendahara		
	Pengelola Gaji	1	
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Pengadministrasi Perkantoran	1	
5	Bidang Perlindungan Anak		
1	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	

6	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	

6. Jabatan Fungsional yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	KET.
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	2	
2	Bidang Perlindungan Anak		
	Fungsional Pekerja Sosial Muda	2	
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	2	
4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	3	

1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2022		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN IKK KELUARAN/OUTPUT TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1							
		289	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG $\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Lembaga pemerintah yg sudah dilatih PUG}} \times 100\%$	-	-	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	Tidak di Anggarkan
		290	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender}} \times 100\%$	-	28	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	
		291	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Media Massa	-	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Tidak di Anggarkan
		292	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	-	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Belum ada Layanan Anak yang memiliki SPM di Kab. Kep. Selayar
		293	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani $\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat provinsi}} \times 100\%$	$\frac{(9)}{9} \times 100\%$	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		294	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah Layanan Anak 2 Lembaga	2	Bid. Perlindungan Perempuan dan	

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
							Perlindungan Khusus Anak	
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		1. UPT PPA 2. Rumah aman Korban Kekerasan	2	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		296	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang Perempuan Tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah ormas pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh ormas yang ada}} \times 100\%$	-	-	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	Tidak di Anggarkan
		297	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	$\frac{\text{Jumlah kader pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh kader pr}} \times 100\%$	-	-	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	Tidak di Anggarkan
		298	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lembaga layanan PP yg sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh lembaga layanan yg aktif}} \times 100\%$	-	-	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	Tidak di Anggarkan
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		1. UPT PPA 2. Rumah aman Korban Kekerasan	2	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		300	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		-	-	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Belum ada kebijakan

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		301	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		-	-	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Blm ada lembaga di Kep. selayar
		302	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
2.								
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	-	-	Bid. KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	Tidak di Anggarkan
		337	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-		≥ 20	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Remaja Kelompok Umur 15-19 Tahun}}{\text{Jumlah kelompok umur 15 - 19}} \times 100\%$	$\frac{241}{6428} \times 100\%$	3,75	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		339	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi \& KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$	$\frac{12502}{10218} \times 100\%$	1,23	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		340	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	$\frac{\text{Jumlah stakeholder \& mitra kerja yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK}}{\text{Jumlah sasaran stakeholder pemangku kepentingan \& mitra kerja}} \times 100\%$	$\frac{21}{13} \times 100\%$	1,61	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		341	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah Faskes}} \times 100\%$	$\frac{19}{19} \times 100\%$	100	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		342	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah MKJP}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{3.693}{18965} \times 100\%$	19,47	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		343	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Pokja Kampung KB	88	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		344	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{1.716}{3,359} \times 100 \%$	51,08	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Siga
		345	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		$\frac{90}{18965} \times 100 \%$	0,475	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Siga
		346	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{12896}{18965} \times 100 \%$	67,99	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Siga

2.2 . Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD	$\frac{876.818.649.197}{1.107.986.364.234} \times 100\%$	0,79	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	$\frac{9}{9} \times 100\%$	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk Perempuan	$\frac{2}{72.691} \times 100.000\%$	0,00027	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,1	Bid. Dalduk	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	$\frac{12394}{18965} \times 100\%$	65,35	Siga 2023	
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{1422}{18965} \times 100\%$	7,49	Siga 2023	PUS bukan Peserta KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan Panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu ----- x 100% Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur Panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	$\frac{1230}{7376} \times 100\%$	16,68	Bina Bangsa	

BAB III

PENUTUP

Dalam upaya peningkatan akses Pelayanan KB dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak di perlukan dukungan kebijakan dan dukungan operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dukungan kebijakan yang sangat diperlukan lebih difokuskan dalam hal Pemberdayaan kapasitas institusi, sehingga mampu mengelola kepentingan daerah secara umum dan kepentingan program KB dan Pemberdayaan Perempuan khususnya.

Dalam era otonomi daerah saat ini, tidak sedikit petugas lapangan dan penyuluh KB dialih tugaskan untuk menduduki jabatan tertentu yang menyebabkan roda pelaksanaan program KB belakangan ini dirasakan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan upaya penggantian dan penambahan petugas lapangan dan penyuluh lapangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan adanya LPPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan Akuntabilitas, kami menyadari dalam penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan usulan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LPPD tahun berikutnya.

Benteng, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003